

Strategi Pengembangan Agribisnis Hortikultura di Luwu Utara: Suatu Pendekatan Kelembagaan dan Eko-Geografi

Horticultural Agribusiness Development Strategy in Luwu Utara: An Institutional and Eco-Geography Approaches

Andi Nuddin^{*1}, Muh Hatta Jamil², Alimuddin Laapo³

^{*)} Email Korespondensi: andinuddin1956@gmail.com

¹⁾ Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Parepare, Jl. Jend. Ahmad Yani km 06, Kota Parepare 91111, Sulawesi Selatan

²⁾ Departemen Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan km .10 Tamalanrea Makassar 90245, Sulawesi Selatan

³⁾ Departemen Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Tadulako, Jl. Sukarno-Hatta km 9 Palu 94117, Sulawesi Tengah

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah menetapkan kebijakan pengembangan kawasan agribisnis hortikultura dan penguatan jarak antara pusat wilayah dan daerah pedesaan sebagai penghasil komoditas buah dan sayuran. Namun dukungan potensi sumber daya alam masih menjadi perdebatan antar lembaga. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan potensi sumberdaya eko-geografis dan seberapa besar tingkat kepentingan sistem kelembagaan dalam upaya pengembangan agribisnis hortikultura. Data yang telah diperoleh dianalisis melalui dua pendekatan, yaitu data menyangkut aspek eko-geografi dianalisis melalui pendekatan kompleks wilayah. Sedangkan data yang menyangkut aspek sosial dan kelembagaan dianalisis melalui pendekatan Interpretative Structural Modeling (ISM). Hasil penelitian menunjukkan semua aspek eko-geografi meliputi topografi, tingkat marmer, jenis tanah, dan curah hujan, adalah sumber daya potensial dalam pengembangan hortikultura. Meskipun semua aspek selain jumlah pendanaan, sangat membutuhkan manajemen yang efektif. Analisis ISM menunjukkan bahwa pengembangan hortikultura membutuhkan dukungan program strategis, yaitu: (1) pengembangan sarana transportasi, (2) efektivitas koordinasi antar lembaga, (3) legitimasi dan sosialisasi program, pemerataan visi-misi program hortikultura, (4) optimalisasi peran lembaga, (5) penguatan komitmen antar sektor, (6) peningkatan pengetahuan, dan (7) pengembangan program strategis. Secara keseluruhan program akan lebih mudah diwujudkan ketika didukung oleh sistem kelembagaan yang kuat.

Kata kunci: hortikultura; kelembagaan; eko-geografi; potensi sumberdaya.

ABSTRACT

The North Luwu Regency Government has established a policy of developing horticultural agribusiness areas and strengthening the distance between the regional center and rural areas as producers of fruit and vegetable commodities. However, the support for the potential of natural resources is still a matter of debate between institutions. The purpose of the research was to describe the potential of eco-geographical resources and the level of importance of the institutional system in the development of horticultural agribusiness. The data that has been obtained were analyzed through two approaches, namely the data concerning the eco-geographical aspect which was analyzed through a regional complex approach. Meanwhile, data concerning social and institutional aspects were analyzed through the Interpretative Structural Modeling (ISM) approach. The results showed that all aspects of eco-geography including topography, marble level, soil type, and rainfall, were potential resources in horticultural development. Although all aspects other than the amount of funding, desperately need effective management. ISM analysis showed that horticulture development requires strategic program support, namely: (1) development of transportation facilities, (2) effectiveness of inter-institutional coordination, (3) program legitimacy and

socialization, equal distribution of vision and mission of horticulture programs, (4) optimization of the role of institutions, (5) strengthening commitment between sectors, (6) increasing knowledge, and (7) developing strategic programs. Overall, the program will be easier to implement when it is supported by a strong institutional system.

Keywords: *horticulture; highland region; institutional; eco-geography; potential resources.*

I. PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah dalam mendukung pengembangan agribisnis hortikultura banyak dilakukan melalui program distribusi bibit kepada petani di seluruh pelosok negeri ini. Namun program tersebut tidak cukup membawa perubahan terhadap pola usahatani dan keragaman produk hortikultura di Indonesia. Bila dibandingkan dengan 20 tahun silam, agribisnis hortikultura Indonesia khususnya buah-buahan, belum mengalami perubahan dan masih didominasi oleh produk usahatani kecil. Usahatani ini termasuk usahatani pekarangan dengan suplai yang tidak dijamin keberkelanjutan.

Program pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah melalui pembagian bibit buah dan sayuran dapat dikatakan tidak berhasil dalam merubah wajah agribisnis hortikultura di Indonesia. Sistem produksi komoditas buah dan sayuran melalui usahatani masyarakat kita umumnya masih bercirikan : (i) skala kecil bersifat sampingan dan belum berskala agribisnis; (ii) umumnya lahan sempit dan/atau tanaman pekarangan (Hoang, *et al.*, 2017); (iii) pola tanam campuran dengan varietas bervariasi, umumnya masih terdapat tanaman biji; (iv) pengelolaan tanaman masih berciri teknologi tradisional dengan mutu produk masih rendah; (v) cara pemanenan dan penanganan pasca panen belum optimal. Tidak berbeda dengan ciri sistem produksi komoditas sayuran, yaitu: (i) skala usaha dan penggunaan modal kecil (Arsyad, *et al.*, 2018); (ii) penerapan teknologi usahatani belum optimal; (iii) tingginya penggunaan pestisida untuk pemberantasan hama; (iv) belum ditunjang penyediaan bibit berkualitas, sehingga mempengaruhi mutu bahan baku dan produk; dan (v) penataan produksi belum berdasarkan pada keseimbangan antara *supply* dan *demand*.

Kondisi ini menunjukkan pembangunan perdesaan yang berjalan seiring pembangunan pertanian selama ini belum berhasil mencapai sasarannya (Rizal, *et al.*, 2016). Jika capaian pembangunan dalam kondisi stabil, maka upaya yang diperlukan lebih lanjut adalah pengendalian dan pengembangan. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka diperlukan perencanaan dan analisis strategi (Nuddin, *et al.*, 2018). Hal ini membutuhkan adanya kebijakan strategis yang dapat menjamin adanya perencanaan program pengembangan yang mampu memprediksi masa depan agribisnis hortikultura di Indonesia. Perencanaan program yang dimaksudkan sekaligus berfungsi sebagai suatu kajian untuk mencari solusi, setidaknya dalam hal pendayagunaan potensi sumberdaya alam di perdesaan (Jariyah, 2014).

Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara memiliki potensi pengembangan usahatani yang cukup besar. Wilayah dengan topografi berbukit dan bergunung berada pada ketinggian antara 700 – 1500 meter dpl, dengan luas ± 68.650 ha merupakan potensi pengembangan agroteknologi. Lahan yang digunakan untuk usahatani baru mencapai ± 13.339 ha, dengan rincian ± 12.394 ha merupakan usahatani lahan kering, dan selebihnya

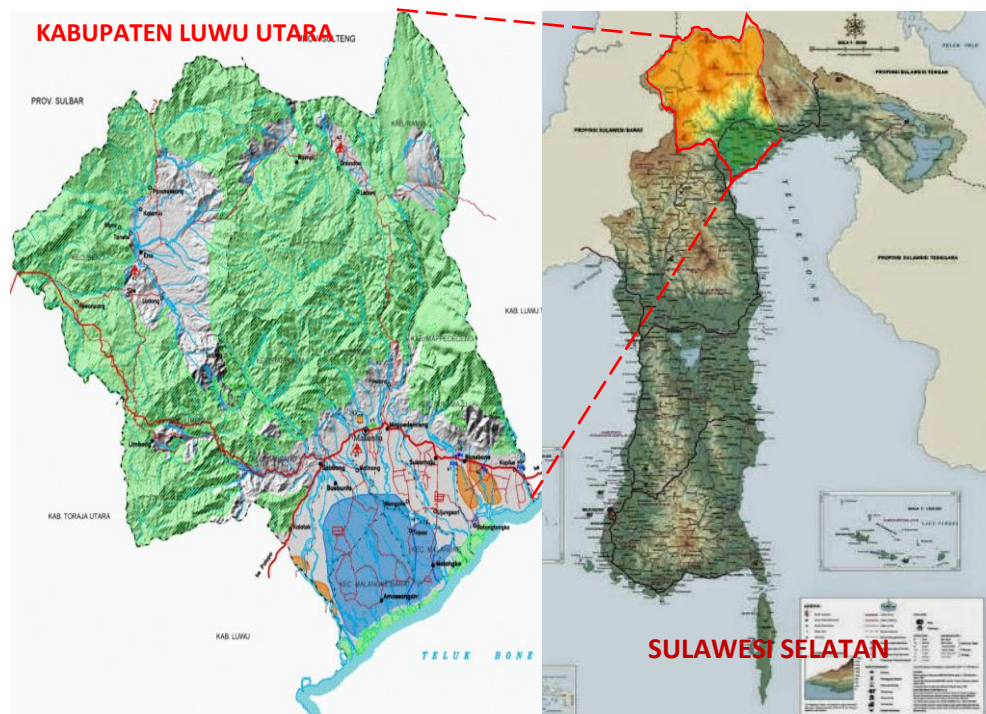
1.005 ha usahatani padi sawah. Lahan pertanian ini umumnya pada morfologi cekungan/lembah, dan selebihnya berada pada tingkat kelereng yang bervariasi.

Salah satu kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara adalah pengembangan kawasan hortikultura sebagai alternatif dalam upaya pengembangan kawasan perdesaan terpadu dengan pengembangan kawasan perkotaan. Harapan ketepaduan kedua kawasan ini adalah terjalinnya interaksi antara pusat kawasan agropolitan dengan wilayah perdesaan sebagai produsen komoditas buah dan sayuran. Hal tersebut mendorong dilakukan penelitian ini dengan tujuan: *pertama*, untuk mendeskripsikan bagaimana potensi sumberdaya eko-geografi dalam mendukung capaian program, dan *kedua* seberapa besar tingkat kepentingan sistem kelembagaan dalam upaya pengembangan agribisnis hortikultura.

II. METODE PENELITIAN

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan (Gambar 1). Secara geografis, Kecamatan Rongkong terletak antara 2°24'23" LS – 2°40'31" LS dan 119°47'46" BT – 120°05'36" BT. Jarak tempuh lokasi penelitian dari pusat kota Masamba ke pusat kecamatan Rongkong mencapai ± 40 km.



Gambar 1. Peta Kabupaten Luwu Utara di Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Data dan Analisis

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri atas: (i) data primer, dan (ii) sekunder. Jenis dan sumber data yang digunakan disesuaikan dengan pendekatan analisis (eko-geografi dan *Interpretative Struktural Modeling*), karena itu jenis data yang dibutuhkan bersumber dari lembaga-lembaga sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diperoleh di lapangan melalui pengamatan/survei (Tabel 1).

Pengumpulan data aspek fisik dan keruangan diperoleh melalui survei/pengamatan lapangan, dan yang terdokumentasi oleh masing-masing SKPD terkait. Data yang menyangkut aspek sosial dan kelembagaan, diperoleh melalui wawancara dengan informan yang mewakili SKPD terkait dengan pengembangan agribisnis hortikultura.

Data yang telah diperoleh dianalisis melalui dua pendekatan. *Pertama*, data menyangkut aspek eko-geografi dianalisis melalui pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis fenomena-fenomena keruangan dengan menghubungkan fenomena keruangan lainnya. *Kedua*, data menyangkut aspek sosial dan kelembagaan dianalisis melalui pendekatan *Interpretative Structural Modeling* (Faisal, 2010).

Tabel 1. Jenis, karakteristik, dan penggunaan data yang dibutuhkan untuk penelitian.

Data	Karakteristik Data	Penggunaan Data	Sumber Data
Fisik-geografi	Data menyangkut aspek aspek ekologi dan geografi: - Topografi - Hidrologi/tata air - Vegetasi/penutupan lahan - Cuaca/Iklim	Untuk mendeskripsikan dan menganalisis keterkaitan antara aspek-aspek fisik geografi terhadap budidaya tanaman	- Lembaga-lembaga/ SKPD di Kab. Luwu Utara - Suvei lapangan
Aspek sosial	Indikator peran setiap lembaga dalam pengembangan hortikultura ditetapkan ber-dasarkan posisi : (1) Independent, (2) Linkage, (3) Dependent, dan (4) Autono-mous.	Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran SKPD pengembangan hortikultura di Kecamatan Rongkong.	- Informan/pakar dan praktisi dari beberapa SKPD terkait

Analisis data melalui pendekatan ISM, dilakukan melalui tahapan-tahapan: (i) Menyusun *Structural Self-Interaction Matrix* (ISM), yaitu mentransfer hasil penilaian informan kedalam simbol-simbol V, A, X dan O; (ii) Menyusun tabel *Reachability Matrix*, dengan mengganti simbol-simbol V, A, X dan O dengan angka 1 dan 0; (iii) Menyusun model struktural setiap elemen; dan (iv) menyusun *Matrix Driver Power – Dependent* (DP-D).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendekatan Eko-geografi dalam Pengembangan Hortikultura

Fokus perhatian eko-geografi adalah kelangsungan interaksi dan interdependensi antara manusia dan lingkungannya. Manusia di satu pihak, dan lahan hutan di pihak lain membentuk suatu hubungan saling ketergantungan. Proses saling ketergantungan ini memunculkan kekurangan dan keterbatasan kedua belah pihak. Bentuk interaksi antara aspek-aspek fisik-geografi (topografi, jenis tanah, iklim, dan cuaca) dengan manusia (teknologi dan sosial budaya), mewujudkan aneka ragam pola usahatani. Interaksi antara manusia dan lingkungan membentuk hubungan dua arah yang saling mempengaruhi, meskipun pada umumnya pola interaksi ini lebih bersifat antroposentris. Pola usahatani sangat bergantung pada teknologi dan budaya, sampai batas-batas yang dapat ditoleransi

oleh manusia. Namun tidak semua aspek fisik-geografi dapat ditaklukkan oleh manusia. Lahan dengan tingkat kemiringan lebih berat misalnya, merupakan faktor penghambat kegiatan usahatani.

Topografi dan Curah hujan. Kecamatan Rongkong adalah bagian wilayah Kabupaten Luwu Utara, yang terdiri atas 7 desa, dengan luas wilayah mencapai 68.650 ha. Topografi wilayah ini bervariasi dari perbukitan hingga bergunung, dengan ketinggian antara 700 - 1460 m dpl (Tabel 2). Pada umumnya wilayah Kecamatan Rongkong didominasi oleh ketinggian yang berpotensi terhadap kelangsungan proses kondensasi hujan orografis. Fenomena ini menjadi salah satu faktor pemicu tingginya curah hujan di wilayah tersebut.

Tabel 2. Luas Wilayah dan Ketinggian di atas Permukaan laut (m/dpl) menurut Desa di Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara, Sulsel.

Desa	Luas		Ketinggian (m/dpl)
	Ha	(%)	
Marampa	11.766	17,14	1.460
Limbong	88,08	12,83	1.400
Pengkendekan	63,57	9,26	1.450
Komba	84,52	12,31	1.200
Kanandede	111,62	16,26	700
Minanga	62,85	9,16	900
Rinding Allo	158,20	23,05	1.440
Jumlah	68.650	--	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Luwu Utara, 2018.

Kabupaten Luwu Utara umumnya memiliki curah hujan tinggi. Jumlah bulan basah mencapai kurang lebih 9 bulan, sedangkan bulan kering tidak lebih dari 3 bulan. Sebelas kecamatan di Luwu Utara, dua diantaranya memiliki curah hujan lebih rendah, yaitu Seko dan Rongkong dengan kisaran 2000 – 2500 mm/tahun. Meskipun demikian intensitas curah hujannya masih dalam kisaran curah hujan tinggi dengan tipe iklim B1 - B2. Tingginya curah hujan yang dimiliki suatu daerah sangat mempengaruhi struktur vegetasi, termasuk tutupan lahan hutan dan jenis tanaman yang dibudidayakan.

Jenis Tanah. Melalui sebaran jenis tanah di Kabupaten Luwu Utara, dapat ditunjukkan bahwa kecamatan Rongkong dan Seko didominasi oleh jenis tanah *Ultisol* (Tabel 3). Jenis tanah ini sangat potensial untuk pengembangan usahatani lahan kering (Erfandi, *et al.*, 2001). Namun tidak berarti bahwa pemanfaatan lahan dengan jenis tanah semacam ini tidak memiliki faktor penghambat. Jenis tanah ini telah dimanfaatkan dalam usaha skala besar untuk perkebunan kelapa sawit, karet, dan hutan tanaman industri. Namun dalam usahatani skala rumah tangga, faktor modal merupakan salah satu penyebab sehingga tanah semacam ini tidak terkelola dengan baik.

Beberapa kendala pemanfaatan lahan dengan jenis tanah *Ultisol* untuk pengembangan hortikultura di Kecamatan Rongkong adalah: (i) tingginya kemasaman dan kejenuhan Al, (ii) rendahnya kandungan hara dan bahan organik, dan (iii) tingginya kepekaan tanah terhadap erosi. Namun kendala tersebut dapat diatasi dengan penerapan teknologi melalui

pengapuran, pemupukan, dan pengelolaan bahan organik yang tepat. Selain itu penting dipahami oleh petani bahwa penggunaan tanah *Ultisol* dalam pengembangan tanaman pangan lebih banyak menghadapi kendala, dibandingkan dengan pemanfaatan untuk tanaman perkebunan. Pada umumnya tanaman pangan adalah tanaman semusim yang lebih berpotensi terhadap bahaya erosi.

Untuk Kecamatan Rongkong dengan curah hujan tinggi, topografi, dan kelerengan yang curam, dengan jenis tanah *Ultisol* yang sangat peka terhadap erosi, usahatani tanaman semusim semakin beresiko terhadap lingkungan. Karena itu pilihan untuk pengembangan Kecamatan Rongkong, paling tepat kearah usahatani hortikultura buah-buahan, yang memungkinkan pengelolaannya melalui sistem agroforestry (Camilli, *et al.*, 2018).

Tabel 3. Jenis Tanah menurut wilayah cakupannya di Kabupaten Luwu Utara.

Jenis Tanah	Wilayah Cakupan/kecamatan	Keterangan
<i>Inceptisol</i>	Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Sukamaju	Liat marin
<i>Ultisol</i>	Kecamatan Rongkong Kecamatan Seko	Liat, reaksi masam
<i>Entisol</i>	Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat Kecamatan Bone-Bone	Jenuh air

Sumber : BPS, Kabupaten Luwu Utara, 2018.

Penggunaan Lahan. Data penggunaan lahan dibedakan antara lahan pertanian dan bukan lahan pertanian (Tabel 4). Lahan pertanian di Kecamatan Rongkong dibedakan antara lahan sawah dan bukan sawah (13.339 ha). Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah (1.005 ha). Lahan pertanian yang bukan sawah terdiri atas kebun, tegalan, dan ladang, yang teridentifikasi berupa lahan kering dan kebun campuran (12.394 ha) yang dikenal dengan istilah agroforestry (Hakim, *et al.*, 2018). Sedangkan lahan yang bukan lahan pertanian merupakan hutan primer, hutan sekunder, savana dan semak/belukar (55.251 ha).

Tabel 4 menunjukkan potensi pengembangan hortikultura di Kecamatan Rongkong cukup besar, yaitu seluruh lahan pertanian di luar sawah yang luasnya 12.394 ha atau 92,47% dari luas seluruh lahan pertanian. Ini menunjukkan dari pandang penggunaan lahan, Kecamatan Rongkong sangat potensil untuk pengembangan hortikultura. Hal ini didukung oleh adanya luasan penggunaan lahan di luar persawahan dalam bentuk lahan kering. Namun demikian yang penting dipertimbangkan adalah bagaimana pengelolaan yang semaksimal mungkin sebagai akibat adanya sifat fisik lahan yang potensil menimbulkan risiko terhadap lingkungan. Selain resiko lingkungan, juga kondisi fisik lahan memerlukan pengelolaan yang intensif dan membutuhkan input produksi yang besar.

Tabel 4. Penggunaan Lahan Pertanian Menurut Desa di Kecamatan Rongkong Tahun 2017.

Desa	Lahan Pertanian				Lahan Pertanian (ha)	Lahan bukan Pertanian (ha)	Luas Desa (ha)
	Luas Sawah (ha)	Persentase (%)	Luas Bukan Sawah (ha)	Persentase (%)			
Marampa	110	4,33	2.429	18,21	2.539	9.227	11.766
Rongkong	120	5,15	2.209	16,56	2.329	6.479	8.808
Pangkendekan	140	8,41	1.527	11,44	1.667	4.690	6.357
Komba	105	4,96	2.010	15,09	2.115	6.337	8.452
Kanandede	150	7,83	1.765	13,23	1.915	9.247	11.162
Minanga	179	13,11	1.186	8,89	1.365	4.920	6.285
Runding Allo	201	14,27	1.208	9,05	1.409	14.351	15.820
Total	1.005	7,53	12.394	92,47	13.339	55.251	68.650

Sumber: BPS, Kabupaten Luwu Utara, 2018.

2. Pendekatan Kelembagaan dalam Pengembangan Hortikultura

Peran aktif antar lembaga sangat dibutuhkan dalam perumusan strategi untuk memaksimalkan aspek fisik-geografi dalam pengembangan agribisnis hortikultura di Kecamatan Rongkong (Aini dan Nadida, 2014). Ini diharapkan mampu memaksimalkan segala potensi kekuatan yang ada, dan meminimalisir aspek-aspek yang dapat menghambat program. Hasil analisis *Interpretative Structural Modeling* (ISM) menunjukkan bahwa dari 13 program yang dianalisis, 10 diantaranya ditetapkan sebagai program yang strategis dalam pengembangan hortikultura (Tabel 5).

Salah satu program yang ada di posisi independen adalah pembangunan sarana transportasi dengan bobot *Driver-Power* (DP) dan *Dependent* (D) masing-masing 0,92 dan 0,38. Kepentingan sarana transportasi merupakan dasar pengembangan ekonomi suatu wilayah. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa dua kecamatan di Kabupaten Luwu Utara pada saat dimulai pengembangan hortikultura di tahun 2017, masih terisolir dalam prasarana dan sarana transportasi darat yaitu Kecamatan Seko dan Rongkong.

Dukungan kelembagaan terindikasi melalui hasil analisis ISM tentang pentingnya (i) penyamaan visi-misi pengembangan hortikultura, (ii) diperlukan peningkatan pengetahuan keterampilan penyuluh (Kherallah and Kirsten, 2010). Hasil analisis ISM menunjukkan bahwa kedua sub-elemen ini merupakan program strategis prioritas kunci (DP = 1,00). Menyusul lima program, yaitu: (i) pengefektifan koordinasi antar sektor (DP = 0,92 dan D = 0,61), (ii) legitimasi dan sosialisasi program (DP = 0,92 dan D = 0,77), (iii) optimalisasi peran lembaga (DP = 0,92 dan D = 0,61), (iv) penguatan komitmen antar sektor (DP = 0,92 dan D = 0,61), (v) dan penumbuhkembangan sektor pasar (DP = 0,92 dan D = 0,61). Dua program lainnya, yaitu: (i) pemberian insentif (DP = 0,54 dan D = 0,92), dan (ii) pengembangan sarana penunjang (DP = 0,52 dan D = 0,85).

Kesepuluh sub-elemen ini merupakan program strategis yang diharapkan terwujudkan dalam pengembangan agribisnis hortikultura melalui dukungan koordinasi antar lembaga yang optimal. Pemetaan ke-10 program strategis berdasarkan posisi kepentingan masing-

masing dalam pengembangan hortikultura di Kecamatan Rongkong, dapat diilustrasikan dalam bentuk matriks *Driver Power – Dependent* (Gambar 2).

Tabel 5. Perbandingan Bobot *Driver Power- Dependent* (DP - D) Program Strategis dalam Pengembangan Hortikultura di Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara.

Posisi	Sub elemen	Bobot	
		DP	D
1. <i>Independent</i> (Daya dorong terhadap pro-gram kuat, sebalik-nya ketergantungan terhadap sub elemen lainnya lemah)	1. Pembangunan sarana transportasi	0,92	0,38
	Rata-rata	0,92	0,38
2. <i>Linkage</i> (Daya do-rong terhadap prog-ram kuat, dan ke-tergantungan terha-dap sub elemen lain-nya juga kuat)	1. Penyamaan visi-misi pengembangan hortikultura	1,00	0,77
	2. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan penyuluh	1,00	0,69
	3. Pengefektifan koordinasi antar sektor	0,92	0,61
	4. Legitimasi dan sosialisasi program	0,92	0,77
	5. Optimalisasi peran lembaga/ <i>stakeholder</i>	0,92	0,61
	6. Penguatan komitmen antar sektor	0,92	0,61
	7. Penumbuhkembangan sektor pemasaran	0,92	0,61
	8. Pemberian insentif	0,54	0,92
	9. Pengembangan sarana penunjang	0,54	0,85
	Rata-rata	0,85	0,71
3. <i>Dependence</i> (Daya dorong terhadap prog-ram lemah, dan seba-liknya ketergantungan terhadap sub ele-men lainnya kuat)	1. Penumbuhkembangan kearifan budaya masyarakat	0,38	0,85
	2. Penguatan fungsi control/penegakan hukum	0,23	1,00
	3. Pengembangan teknologi pengolahan hasil	0,38	0,92
	Rata-rata	0,33	0,92
4. <i>Autonomous</i> (Daya dorong terhadap pro-gram lemah, dan ke-tergantungan terha-dap sub elemen lain-nya juga lemah)	-	-	-
	Rata-rata	-	-

Gambar 2 menunjukka ada sembilan program di posisi linkage. Kesembilan program ini memerlukan kehati-hatian dalam hubungannya dengan pengelolaan program. Indikasi posisi *linkage* adalah setiap program yang ada didalamnya memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam pengembangan hortikultura. Namun sebaliknya, dengan besarnya kebergantungan (*dependent*) terhadap faktor lainnya, maka pengaruh umpan balik yang terjadi berpotensi menghambat program pengembangan hortikultura. Peran kelembagaan

dalam bingkai tatanan koordinasi antar lembaga sangat dibutuhkan dalam upaya memaksimalkan pendayagunaan sumberdaya eko-geografi menuju pengembangan agribisnis hortikultura di Kecamatan Rongkong. Pengembangan hortikultura ini akan memperkuat jalinan interkasi antara pusat kawasan agropolitan dengan wilayah perdesaan sebagai produsen komoditas buah dan sayuran.

Driver Power (DP)	13									10	6			
	12				1				2, 8, 9, 11		4			
	11		Independent								Linkage			
	10													
	9													
	8											12	7	
	7													
	6													
	5											3	13	
	4		Autonomous							Dependent				
	3													5
	2													
	1													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dependent (D)														

Keterangan:

1. Pembangunan sarana transportasi
2. Pengefektifan koordinasi antar sektor
3. Penumbuhkembangan kearifan budaya masyarakat
4. Legitimasi dan sosialisasi program
5. Penguatan fungsi control/penegakan hukum
6. Penyamaan visi-misi pengembangan hortikultura
7. Pemberian insentif
8. Optimalisasi peran lembaga/ *stakeholder*
9. Penguatan komitmen antar sektor
10. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan penyuluh
11. Penumbuhkembangan sektor pemasaran
12. Pengembangan sarana penunjang
13. Pengembangan teknologi pengolahan hasil

Gambar 2. Matrix Driver Power- Dependent program strategi pengembangan hortikultura di Kecamatan Rongkong

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah salah satu faktor resiko pengembangan hortikultura

di Kecamatan Rongkong, adanya dominasi jenis tanah *Ultisol* yang memiliki sifat kemasaman yang tinggi dengan kejenuhan Al, rendahnya kandungan hara dan bahan organik, serta tingginya kepekaan tanah terhadap erosi. Berdasarkan sudut pandang penggunaan lahan Kecamatan Rongkong sangat potensial untuk pengembangan hortikultura. Hal ini didukung oleh adanya luasan penggunaan lahan di luar persawahan dalam bentuk lahan kering yang mencapai 92,47% dari luas lahan pertanian. Dukungan kelembagaan dalam pengembangan hortikultura di Kecamatan Rongkong terindikasi melalui hasil analisis ISM tentang pentingnya (i) penyamaan visi-misi pengembangan hortikultura, (ii) peningkatan pengetahuan keterampilan penyuluh, (iii) pengefektifan koordinasi antar sektor, (iv) legitimasi dan sosialisasi program, (v) optimalisasi peran lembaga, (vi) penguatan komitmen antar sektor, dan (vii) penumbuhkembangan sektor pasar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dilakukan dengan dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabupaten Luwu Utara. Terima kasih kepada seluruh perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah atas partisipasinya dalam FGD, Sinkronisasi dan kemungkinan pemanfaatan hasil-hasil penelitian ini. Terima kasih yang mendalam kepada Professor Muhammad Arsyad, Ph.D. (Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Universitas Hasanuddin) atas diskusinya yang sangat berharga di awal-awal konstruksi draft tulisan ini.

REFERENSI

- Aini, Y. N., & Nadida, Z., (2014). Analisis Kelembagaan Petani dalam Mendukung Keberfungsian Infrastruktur Irigasi (Studi Kasus: Daerah Irigasi Batang Anai, Sumatera Barat). *Jurnal Sosek Pekerjaan Umum*, 6(3): 140-221.
- Arsyad, M., H. Heliawaty., Y. Kawamura., and S. Yusuf, (2018). Agricultural Development-Marketing Nexus: Is Tengkulak truly Enemy of Smallholders in Indonesian Rural Area? *Internasional Journal of Agreculture System (IJAS)*, 6(1): 60-67.
- Camilli, F., A. Pisanelli., G. Seddaiu., A. Franca., V. Bondesan., A. Rosati., G.M. Moreno., A. Pantera., J.E. Hermansen, & P.J. Burgess. (2018). How local Stakeholders Perceive Agroforestry Systems: an Italian Perspective, 92(4): 849–862.
- Erfandi, D., I. Juarsah, dan U. Kurnia. 2001. Perbaikan sifat fisik tanah Ultisol Jambi, melalui pengelolaan bahan organik danguludan. hlm. 171-180. *Dalam* A. Sofyan, G. Irianto, F. Agus, Irawan, W.J. Suryanto, T. Prihatini, M. Anda (Ed.). *Prosiding Seminar Nasional Reorientasi Pendayagunaan Sumberdaya Tanah, Iklim, dan Pupuk*, Cipayung, 31 Oktober-2 November 2000. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat,
- Faisal, M. N., 2010. Analysing the Barriers to Corporate Social Responsibility in Supply Chains: An Interpretative Structural Modelling Approach. *A Leading Journal of Supply Chain Management*, 13(3): 179-195. <http://doi.org/10.1080/13675560903264968>.
- Hakim, L., N.R. Pamungkas., K.P. Wicaksono. & Soemarno. (2018). Conservation Osingnese Traditional Home Garden Agroforestry in Banyuwangi, East Java, Indonesia. *AGRIVITA Journal of Agricultural Science*. 40(3):506-514 <http://doi.org/10.17503/agrivita.v40i3.1605>.

- Hoang, L.T., J.M. Roshetko., T.P. Huu., T. Pagella. & P.N. Mai. (2017). Agroforestry - The Most Resilient Farming System for the Hilly Northwest of Vietnam. *International Journal of Agriculture System* (5)1: 1-23.
- Jariyah, N.A. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (Rlkt) di Sub DAS Keduang, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. *Balai Penelitian Teknologi Kehutanan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 11(3): 211 – 221.
- Kherallah, M., & J. F. Kirsten, (2010). The New Institutional Economics: Applications for Agricultural Policy Research in Developing Countries. *Journal Agrekon*, 42(2): 110-133. [https://doi.org/ 10. 1080/ 03031853.2002.9523589](https://doi.org/10.1080/03031853.2002.9523589).
- Nuddin, A., Reskiana., Arman., S. Yusuf., Nuringsih., M. Arsyad., A. Bustan. & A. Laapo. (2018), Designing New Strategy for Enhancing Robusta Coffee Production: An Application of Interpretative Structural Modeling. *International Journal Agriculture System*. 6(2): 156-163. <http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/ijas>.
- Rizal, M., Wiryawan, B., Wisudo, S. H., Solihin, I., and Haluan, J., (2016), Institutional Defelopment Strategy Through Interpretative Structural Modelling (ISM) for Gilinet Fisher Group in Basela Aceh, Indonesia. *Journal AACL Bioflux*. 9(4): 802-814. <http://www.bioflux.com.ro/aad>.